

# PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA PEMILIHAN PENGHULU DI KEPENGHULUAN TELUK PIYAI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR 2016

Oleh:

**Hidayatullah Husaini**

**Email: dayathusaini@gmail.com**

**Dosen Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru  
2893-Telp/Fax. 076163277

## **Abstract**

*This study, which is substantiated simultaneously in rural elections in 2016, according to Law No. 6 of 2014 Village. Penghulu elections are held at the same time as Bay Kepenghuluan Piyai Kubu District Rokan Hilir. At the time of the elections, the community's non-selective behavior was very high. Based on the background of the problem, the study aims to determine the reasons for Gulf Kepenghuluan communities memilih no Piyai Kubu district Rokan Hilir on village headquarters at the same time in 2016. The research approach is used in this paper qualitative. Data mining is primary and secondary data. The data was collected on research information materials and documents. The data was analyzed in a descriptive manner.*

*These findings suggest that socio-economic factors at higher education levels, as well as the causes of human behavior, have only been found by a few informants, and the majority of non-voters have caused low levels of education, low economic. Various perceptions make people more concerned with piyai rooms, such as work, rather than participating in the prince elections. Judging by the public psychological factors in the Gulf Kepenghuluan Piyai people tend to choose where the absence of emotional relationships with the potential prince, and high indifference to political activity that causes prejudice on the choices of the prince as something useless. It looks like a rational choice for factor people who are not allowed to vote because they consider going to choose the benefits and benefits. Thus, they are more concerned about job issues than at the polling station. Judging by the political confidence factor, people do not vote because it does not believe the government's performance kepenghuluan bay piyai and do not believe the mayor's nominee, so that the public is more concerned with the job, rather than going to the choice of the Prince of the Gulf of Kepenghuluan Piyai 2016.*

**KEYWORDS:** *Not choosing behavior, choice of directors*

## **1. PENDAHULUAN**

Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (14), yang dimaksud pemilihan penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu Defenitif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya pada ayat (15) panitia pemilihan penghulu tingkat kepenghuluan yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan penghulu. Pemilihan Penghulu dilaksanakan melalui tahapan: 1) Persiapan, 2) Pencalonan, 3) Pemungutan Suara, dan 4) Penetapan.

Kepenghuluan adalah kata lain dari desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, salah

satunya adalah Kepenghuluan Teluk Piyai. Asal nama Penghulu Teluk Piyai ditemukan Teluk dan banyak umpun Piyai sehingga masyarakat menamakannya Teluk Piyai. Pada tahun 1971 kepenghuluan Teluk Merbau terjadi pemekaran menjadi Camat, sedangkan Teluk Piyai menjadi Kepenghuluan Teluk Piyai. Perbatasan Penghulu Teluk Piyai, sebelah Utara Laut, sebelah Selatan dengan Kelurahan Teluk Merbau, sebelah Barat Teluk Piyai Pesisir, sebelah Timur berbatasan dengan Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur.

**Tabel 1**  
**Panitia Panwas Tahun 2016**

No	Nama	Jabatan
1	Robinson	Ketua
2	Yudi Risuwandi	Sekretaris
3	Supirman	Bendahara
4	Syaufi	Anggota
5	Hakim	Anggota

Sumber: Ketua BPK Kepenghuluan Teluk Piyai, 2017

Panwas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, bertugas:

1. Mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan Penghulu.
2. Mengelola anggaran pengawasan kampanye calon Penghulu dan atau pendukungnya.
3. Mengawasi pelaksanaan kampanye calon Penghulu dan Penghulu dan atau pendukungnya.
4. Mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Penghulu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
5. Memberhentikan kampanye Pemilihan Penghulu.
6. Menerima laporan pelanggaran Peraturan Perundang-undang dan tata tertib Pemilihan.
7. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu antara Panitia Pemilihan dengan calon Penghulu.
8. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
9. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada BPK.

Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari:

1. Unsur perangkat Kepenghuluan.
2. Pengurus lembaga kemasyarakatan Kepenghuluan; dan
3. Tokoh Masyarakat.

Pasal 10 ayat (3) menjelaskan bahwa panitia pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. Sedangkan Pasal 11 ayat (1) Panitia Pemilihan Penghulu berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang, dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Pasal 11 ayat (2) Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang dipastikan oleh BPK. Untuk lebih jelasnya mengetahui nama-nama panitia yang disahkan oleh BPK pada pemilihan Kepenghuluan Teluk Piyai pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Panitia Pemilihan Kepenghuluan Teluk Piyai Tahun 2016**

No	Nama	Jabatan
1.	H. Ismail	Ketua
2.	Drs. Burhanudin	Sekretaris
3.	Suriono	Bendahara
4.	Khahijar	Anggota
5.	Rahmad	Anggota
6.	Suwandi	Anggota
7.	Ismail	Anggota
8.	Agus Saputra	Anggota

Sumber: Ketua BPK Kepenghuluan Teluk Piyai, 2017

Pemilihan Penghulu Teluk Piyaidi Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan serentak pada tanggal 17 Juli 2016. Pada tahun 2016 panitia pemilihan menetapkan ada lima calon yang mencalonkan diri menjadi calon Penghulu Teluk Piyai diantaranya yaitu :

**Tabel 3**  
**Calon Penghulu Teluk Piyai 2016**

No	Nama Calon Penghulu Teluk Piyai	Tamatan Sekolah	Suku	Agama
1.	Syamsir	SMP	Melayu	Islam
2.	Darma Endra Basyar	S1	Melayu	Islam
3.	Makmur Hasan	SMP	Melayu	Islam
4.	Eko Saptra	SMA	Jawa	Islam
5.	Sumari	SMP	Jawa	Islam

Sumber: Ketua BPK Kepenghuluan Teluk Piyai, 2017

Dari table di atas dapat dideskripsikan visi dan misi masing-masing calon penghulu. Sehubungan dengan hal di atas, lima calon Penghulu Teluk Piyai pada tahun 2016 dinyatakan panitia telah lulus seleksi dan memenuhi syarat bakal calon Penghulu. Keputusan ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu. Dalam Pasal 32 bagian ketiga Pencalonan paragraf 1 Pendaftaran Calon Penghulu, dan pasal 34 paragraf 2 penelitian Calon, Penetapan dan pengumuman Calon sudah melewati persyaratan pendaftaran calon penghulu Teluk Piyai. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) BPK membentuk Panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat Kepenghuluan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Dalam hal bakal calon penghulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan penghulu menetapkan bakal calon Penghulu menjadi calon Penghulu. Calon Penghulu yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk melihat data jumlah pemilih dan kertas suara pada pemilihan penghulu Teluk Piyai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Jumlah Pemilih dan Kertas Suara**  
**Tahun 2016**

No TPS	Jml Pemilih	Jml yang Menggunakan Hak Pilih	Jml Kertas Suara Sah	Jml Kertas Suara Tidak Sah/Rusak
1	725	396	395	1
2	622	327	325	2
3	517	357	355	2
4	635	388	388	-
Jml	2.499	1.468	1.463	5

Sumber: Ketua BPK Kepenghuluan Teluk Piyai, 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pemilih pada TPS 1 hingga TPS 4 berjumlah 2.499 orang yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2016. Namun tidak terdapat jumlah pemilih tambahan pada pemilihan kepenghuluan Teluk Piyai tersebut. Adapun jumlah yang menggunakan hak pilih dari TPS 1 hingga TPS 4 berjumlah 1.468 orang dan jumlah kertas suara yang sah dari TPS 1 sampai TPS 4 sebanyak 1.463 buah sedangkan jumlah kertas suara yang tidak sah/rusak sebanyak 5 buah.

**Tabel 5**  
**Hasil Perolehan Surat Suara Tahun 2016**

No	Nama Calon	No Urut	Perolehan Suara	Ket
1	Syamsir	1	407	
2	Darma Endar	2	204	
3	Makmur Hasan	3	502	Pemenang
4	Eko Saputra	4	276	
5	Sumari	5	74	

Sumber: BPK Kepenghuluan Teluk Piyai, 2017

Dari tabel diatas telah ditetapkan perolehan suara terbanyak diraih oleh calon Makmur Hasan dengan jumlah 502 suara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 9 Tahun 2015 pada Pasal 56 ayat (1) calon penghulu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon penghulu terpilih. Pemungutan suara pada tanggal 17 Juli 2016 telah terpilih satu orang calon dengan perolehan suara terbanyak yaitu 502 suara. Calon penghulu Makmur Hasan dengan nomor urut 3 (tiga) memperoleh suara terbanyak sebesar 502 suara. Dengan demikian, Makmur Hasan ditetapkan sebagai penghulu terpilih hasil pemilihan Penghulu Teluk Piyai Kecamatan Kubu masa jabatan 2016-2022.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar atau rujukan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan tidak sesuai lagi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, oleh karena itu perlu di ganti. Seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan Juli tahun 2016 (Dua Ribu Enam Belas). Pemilihan Penghulu ini sudah berlangsung setiap 5 tahun sekali. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu pengaturan tentang Penghulu dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan masa jabatan menjadi 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengetahui jumlah perolehan kertas suara tidak memilih pada pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai pada tahun 2016 yang lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Perolehan Kertas Suara Tidak Memilih**  
**Teluk Piyai Tahun 2016**

No TPS	Jml Pemilih	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih%		Jml tidak memilih %	
1.	725	396	15,85	329	13,17
2.	622	327	14,29	295	11,80
3.	517	357	15,52	160	6,40
4.	635	388	13,08	247	9,89
Jml	2.499	1.468	58,74	1.031	41,26

Sumber: BPK Kepenghuluan Teluk Piyai, 2017

**Tabel 7**  
**Perolehan Kertas Suara Tidak Memilih**  
**Kepenghuluan Teluk Pesisir Tahun 2016**

No TPS	Jml Pemilih	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih%		Jumlah tidak memilih %	
1.	628	546	86,6	82	13,1
2.	422	387	91,7	35	8,3
3.	428	365	85,3	63	14,7
4.	365	349	95,6	16	4,4
Jml	1.843	1.647	89,3	196	10,7

Sumber: Ketua BPK Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, 2017

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui perbandingan antara masyarakat yang menggunakan hak pilih dan masyarakat yang tidak memilih. Masyarakat yang menggunakan hak pilih sebesar 1.468 suara dan masyarakat tidak memilih sebesar 1.031 suara. Hal ini sangat disayangkan dengan jumlah pemilih sebanyak 2.499 suara. Dengan jumlah pemilih yang begitu banyak, seharusnya Penghulu Teluk Piyai bisa lebih banyak lagi mendapatkan suara dari masyarakat yang ikut mencoblos. Dapat dibandingkan dengan table 1.8 Perolehan kertas suara tidak memilih di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir. Masyarakat yang menggunakan hak pilih sebesar 1.647 suara dan masyarakat tidak memilih sebesar 196 suara. dengan jumlah pemilih sebanyak 1.843 suara. Akan tetapi sangat disayangkan banyaknya penduduk yang tidak hadir dalam pemilihan penghulu pada tanggal 17 Juli 2016 di Kepenghuluan Teluk Piyai, dibandingkan dengan jumlah pemilih Teluk Piyai Pesisir banyaknya penduduk yang hadir pada saat pemilihan berlangsung. Padahal kegiatan ini tidak kekurangan sosialisasi terkait pemilihan penghulu secara serentak dikarenakan Kepenghuluan Teluk Piyai terletak sangat dekat dengan Kecamatan Kubu. Tentunya tidak ada kesulitan sama sekali dalam hal penyampaian informasi maupun sosialisasi di Kepenghuluan Teluk Piyai.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA PEMILIHAN PENGHULU DI KEPENGHULUAN TELUK PIYAI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR 2016”.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat 41,26% yang tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan yang dilaksanakan panitia pemilihan Penghulu Teluk Piyai pada tanggal 17 Juli 2016 dalam proses pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai banyak ditemukan surat suara berlebih. Partisipasi politik masyarakat tergolong sangat rendah dan jauh dari prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Karena sangat banyak masyarakat yang tidak memilih pada pemilihan penghulu Teluk Piyai Tahun 2016. Oleh karena itu, yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah “**Apa Yang Menyebabkan Sebagian Masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Tidak Memilih Pada Pemilihan Penghulu Di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2016**”?

## 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak memilih masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir pada pemilihan Penghulu secara serentak Tahun 2016.

### 3.2. Manfaat Penelitian

- Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi bagi penulis mengenai Prilaku tidak memilih pada pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2016. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan perilaku tidak memilih masyarakat pada pemilihan Penghulu secara serentak.
- Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi

masyarakat umumnya yang berkaitan dengan perilaku tidak memilih masyarakat dalam pemilihan Penghulu secara serentak.

#### 4. Tinjauan Teori

##### 4.1. Teori Perilaku Politik

Masyarakat dan pemerintah merupakan sekumpulan manusia. Setiap manusia pasti melakukan aktivitas dalam kesehariannya. Tanpa disadari, aktivitas manusia berkaitan dengan politik. Manusia memiliki sikap tersendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul di sekitar mereka. Sikap politik seseorang terhadap suatu objek politik yang terwujud dalam tindakan atau aktivitas politik merupakan perilaku politik seseorang. Menurut Sudijono perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau kesepakatan dalam mewujudkan tujuan dari masyarakat dan pemerintah.

##### 4.2. Teori Perilaku Pemilih

Perilaku memilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.<sup>1</sup> Firmanzah mengemukakan bahwa dinyatakan sebagai pemilih dalam pilkada, yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilu. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.

##### 4.3. Teori Perilaku Tidak Memilih (*Non Voting*)

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan

langsung, tetapi ada sebuah pandangan lain yang berseberangan dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Sisi lain yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlemen. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.

Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput / *nonvoting* pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan perilaku pemilih di atas. Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelley (1975), Burnham (1987), Powell (1986) dan Downs (1957), Moon menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan psikologi. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan tersebut didalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung kontroversi masing-masing.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor psikologis, faktor rasional, dan faktor kepercayaan politik.

##### a. Faktor Sosial Ekonomi

Menempatkan variabel status sosial ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku *non voting* selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku *non voting* tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai

<sup>1</sup>Firmanzah, 2008, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal 87.

indikator untuk mengukur karakteristik pemilih *nonvoting* itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga.

- b. Faktor psikologis  
Penjelasan *non voting* dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian penjelasan pertama melihat bahwa perilaku *non voting* disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran yang tidak acuh cenderung tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari pencatatan politik langsung karena tidak berhubungan kepentingannya.
- c. Faktor Rasional  
Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.
- d. Faktor Kepercayaan Politik  
Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Fenomena faktor kepercayaan politik ini biasanya muncul karena ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk

partai dan akhirnya adanya keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi politik terhadap kekuasaan.

## 5. Metode Penelitian

### 5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Arikunto (2006) bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam memperoleh dan mengumpulkan data dari beberapa informan. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti berusaha menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dengan cara mengumpulkan data dan informasi di lapangan dan menjelaskan dalam bentuk uraian tanpa menguji hipotesis atau membuat prediksi.

### 5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan bahwa pada saat proses pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai banyak ditemukan jumlah masyarakat tidak memilih sebanyak 41,26% suara. Dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang relatif lebih rendah di Kepenghuluan Teluk Piyai. Hal ini menyebabkan peneliti ingin meneliti.

### 5.3. Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Dalam Penelitian ini data primer yang dimaksud adalah: 1) Laporan hasil pemilihan penghulu kepenghuluan teluk piyai, dan 2) Masyarakat Teluk Piyai yang tidak memilih pada pemilihan Penghulu tahun 2016.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak kedua. Yakni data yang diperoleh dari sumber data yang sudah dan tersedia yang berfungsi sebagai bahan pendukung terhadap data primer berupa keterangan ataupun informasi yang relevan penulis peroleh dalam peneliti seperti laporan hasil pemilihan penghulu Kepenghuluan Teluk Piyai tahun 2016.

### 5.4. Sumber Data

Informan penelitian adalah orang yang menjadi pemberi informasi dalam penelitian yang berhubungan langsung dengan

permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti terkait permasalahan peneliti.

**Tabel 8**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	H. Ismail	Ketua Panitia
2	Robinson	Ketua Panwas
3	Makmur Hasan	Penghulu Teluk Piyai
4	Asmadi Wibowo	Ketua BPK
5	Salman	Dusun Parit Jabir
6	Luki	Dusun Parit Jabir
7	Anang	Dusun Parit Jabir
8	Dika	Dusun Parit Jabir
9	Usup	Dusun Parit Jabir
10	Jepri	Dusun Parit Jabir
11	Isap	Dusun Sungai Lilin
12	Radi	Dusun Sungai Lilin
13	Nurasiah	Dusun Sungai Lilin
14	Kamal	Dusun Sungai Lilin
15	Agus	Dusun Sungai Lilin
16	Mopit	Dusun Sungai Lilin
17	Jumari	Dusun Sungai Lilin
18	Takim	Dusun Paluh
19	Sabingung	Dusun Paluh
20	Pauzi	Dusun Paluh
21	Sunardi	Dusun Paluh
22	Paimun	Dusun Paluh
23	Harianto	Dusun Paluh
24	Martono	Dusun Sungai Tunggak
25	Sukiman	Dusun Sungai Tunggak
26	M. Sanusi	Dusun Sungai Tunggak
27	Fauzan	Dusun Sungai Tunggak
28	Robino	Dusun Sungai Tunggak
29	Joko	Dusun Sungai Tunggak

## 5.5. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Dokumen

Dokumen adalah proses pengumpulan data atau informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian penghulu. Laporan Ketua BPK Asmadi Wibowo tentang Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Teluk Piyai tembusan yang disampaikan kepada Kabag Pemerintah Desa (PEMDES) Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 27 Juli 2016.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informan dengan cara Tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan

penyelidikan. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/tanggapan, keterangan, dan sebagainya) dari satu pihak tertentu. Penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan mengenai Perilaku Tidak Memilih Pada Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2016 sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

### 5.6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992), analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara akumulasi menambah pembahasan peneliti terhadap yang ditemukan. Ada beberapa cara untuk menganalisis data tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah berikut seperti reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan dan verifikasi.

Dalam hal ini, penulis menganalisis data-data tersebut yang didapatkan dari informan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data yang telah dikumpulkan maka perlu dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan analisa deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empirik secara mendalam. Dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan maka penulis melakukan pengelompokan menurut jenis dan spesifikasinya dan kemudian dituangkan dalam bentuk tabel dan analisa secara kualitatif. Lalu setelah itu, data ditelaah dan dihubungkan dengan teori-teori yang mendukung pembahasan.

## 6. Hasil dan Penelitian

### 6.1. Gambaran Umum Pemilihan Penghulu Serentak Pada Tahun 2016 di Kepenghuluan Teluk Piyai

Pada tanggal 7 Juli 2016 dilaksanakan pemilihan Penghulu secara serentak di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan lima calon Penghulu yang bersaing pada saat itu. Adapun nama-nama calon Penghulu Teluk Piyai yang mengikuti Pemilihan Penghulu secara serentak di Kepenghuluan Teluk Piyai yaitu: Syamsir, Darma Endra Basyar, Makmur Hasan, Eko Saptra dan Sumari. Yang akhirnya dimenangkan

oleh Makmur Hasan dengan meraih perolehan suara terbanyak mencapai 502 suara. Kemenangan ini sekaligus menjadikan Makmur Hasan sebagai Penghulu Teluk Piyai Periode 2017-2022.

Pemilihan Penghulu secara serentak yang dilaksanakan di Kepenghuluan Teluk Piyai berjalan dengan lancar. Namun ada hal yang sangat di sayangkan pada saat proses pemilihan penghulu berlangsung. Masyarakat yang datang ke pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya sangat sedikit yaitu hanya mencapai 1468 atau sekitar 58,74% suara dari 2499 masyarakat yang terdaftar namanya untuk mengikuti Pemilihan Penghulu secara serentak pada tahun 2016. Artinya masyarakat yang tidak ikut serta memilih pada saat Pemilihan Penghulu secara serentak hanya berjumlah 1031 atau sekitar 41,26%.

## **6.2. Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai pada Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2016**

Pemilihan penghulu merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan penghulu untuk memilih pemimpin yang baru yang melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih nantinya, untuk menjalankan roda pemerintahan yang adil, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik selama menjalankan amanah yang telah diberikan kepada masyarakat. Pemilihan penghulu di kepenghuluan teluk piyai terbagi atas empat dusun dimana setiap dusunnya memiliki peran dalam pemilihan penghulu dari empat dusun tersebut yaitu: Dusun Parit Jabir, Dusun Sungai Lilin, Dusun Paluh, Dusun Sungai Tunggak. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

### **6.2.1 Faktor Sosial Ekonomi**

Dusun Parit Jabir memiliki peran dalam pemilihan penghulu di kepenghuluan teluk piyai, masyarakat yang berada di dusun parit jabir berdekatan dengan masyarakat kelurahan dengan mayoritas masyarakat di dusun parit jabir yaitu melayu. Masyarakat yang berada di dusun parit jabir berjumlah laki-laki sebanyak 374 dan perempuan sebanyak 351 maka jumlah keseluruhannya 725 dengan jumlah pemilih sebanyak itu maka ada daya tarik bagi calon penghulu untuk memperoleh suara dari dusun parit jabir sebanyak-banyak untuk memperoleh kemenangan bagi calon penghulu.

Dalam pemilihan penghulu yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan penghulu panitia penyelenggara telah membagikan surat undangan kepada masyarakat kepenghuluan

teluk piyai khususnya di wilayah dusun parit jabir yang telah dibagikan oleh panitia agar datang pada hari H yang telah ditentukan panitia untuk memilih calon penghulu yang sesuai dengan pilihan mereka, agar menggunakan hak suaranya dalam pemilihan penghulu tersebut. Akan tetapi setelah penghitungan surat suara yang sah dan yang tidak sah banyak masyarakat yang tidak hadir pada saat pemilihan penghulu di kepenghuluan teluk piyai yang diselenggarakan secara serentak di kecamatan kubu tahun 2016. Berdasarkan data dari BPK Kepenghuluan Teluk Piyai tahun 2016 menunjukkan bahwa perolehan kertas suara yang tidak memilih di Dusun I Parit Jabir sebanyak 329 atau sebesar 13,17% masyarakat yang tidak memilih.

### **6.2.2 Faktor Psikologis**

Dusun Sungai Lilin merupakan kawasan wilayah di Kepenghuluan Teluk Piyai yang memiliki basis suara yang cukup banyak untuk memilih calon penghulu. Masyarakat dusun sungai lilin mayoritas masyarakatnya suku jawa, pekerjaan sehari-hari mereka ada yang berkebun cabai, sebagai petani padi, pengusaha kecil-kecilan, bekerja mendodos sawit, dan kebanyakan masyarakat dusun sungai lilin berkerja mengambil upah mendodos sawit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat sungai lilin memiliki peran dalam pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai dengan basis suara yang cukup besar dengan jumlah pemilih laki-laki 320 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 302 maka jumlah daftar pemilih tetap keseluruhannya 622 orang. Dengan jumlah pemilih sebanyak itu maka ada daya tarik bagi calon penghulu untuk memperoleh suara dari dusun parit jabir sebanyak-banyak untuk memperoleh kemenangan bagi calon penghulu.

Dalam pemilihan penghulu yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan penghulu panitia penyeleggara telah membagikan surat undangan kepada masyarakat kepenghuluan teluk piyai khususnya di wilayah dusun sungai lilin yang telah dibagikan oleh panitia agar datang pada hari H yang telah ditentukan panitia untuk memilih calon penghulu yang sesuai dengan pilihan mereka, agar menggunakan hak suaranya dalam pemilihan penghulu tersebut. Akan tetapi setelah penghitungan surat suara yang sah dan yang tidak sah banyak masyarakat yang tidak hadir pada saat pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai yang diselenggarakan secara serentak di Kecamatan Kubu tahun 2016. Berdasarkan data dari BPK Kepenghuluan Teluk Piyai tahun 2016 menunjukkan bahwa perolehan kertas suara

yang tidak memilih di Dusun II Sungai Lilin sebanyak 295 atau sebesar 11,80% masyarakat yang tidak memilih.

### **6.2.3 Faktor Pilihan Rasional**

Dusun paluh memiliki andil dalam pemilihan penghulu teluk piyai untuk memilih calon penghulu. Masyarakat dusun paluh yang mayoritas masyarakatnya suku jawa dan hanya beberapa masyarakat melayu didalamnya, pekerjaan masyarakat dusun paluh sehari-hari kebanyakan sebagai petani padi, petani cabai, petani sawit, tukang dodos sawit, melangsir buah petani, dan lain-lain sebagainya. Dengan jumlah pemilih yang terdaftar didalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah keseluruhan 517 dengan jumlah laki-laki sebanyak 270 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 247 orang. Maka dusun paluh juga sangat diperhitungkan suaranya bagi para calon penghulu untuk memperoleh suara yang banyak dari masyarakat untuk memilih dirinya sebagai penghulu teluk piyai yang akan mendatang.

Banyak cara yang dilakukan oleh calon penghulu dan tim suksesnya dalam kampanye untuk menarik simpati dari masyarakat dusun paluh yaitu dengan cara menyampaikan visi dan misinya kedepannya jika dia terpilih menjadi penghulu teluk piyai, ada juga yang memberikan bantuan kepada pemuda, masyarakat untuk menarik hati masyarakat agar memilih dia pada saat pemilihan nantinya. Panitia sebagai penyelenggara pemilihan penghulu telah melaksanakan tugas yaitu dengan membagikan undangan kepada masyarakat dusun paluh agar datang pada saat pemilihan yang telah ditentukan oleh panitia dan mengawasi selama kampanye calon penghulu. Akan tetapi setelah penghitungan surat suara yang sah dan yang tidak sah banyak masyarakat yang tidak hadir pada saat pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai yang diselenggarakan secara serentak di Kecamatan Kubu tahun 2016. Berdasarkan data dari BPK Kepenghuluan Teluk Piyai tahun 2016 menunjukkan bahwa perolehan kertas suara yang tidak memilih di Dusun III Paluh sebanyak 160 atau sebesar 6,40% masyarakat yang tidak memilih.

### **6.2.4 Faktor Kepercayaan Politik**

Dusun Sungai Tunggak merupakan kawasan wilayah di Kepenghuluan Teluk Piyai yang memiliki basis suara yang cukup banyak untuk memilih calon penghulu. Masyarakat dusun sungai tunggak mayoritas masyarakatnya suku jawa, pekerjaan sehari-hari mereka ada yang berkebun cabai, sebagai petani padi, pengusaha kecil-kecilan, bekerja mendodos sawit, dan kebanyakan masyarakat dusun sungai

tunggak bekerja mengambil upah mendodos sawit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat sungai tunggak memiliki peran dalam pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai dengan basis suara yang cukup besar dengan jumlah pemilih laki-laki 315 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 305 maka jumlah daftar pemilih tetap keseluruhannya 620 orang untuk memilih calon penghulu. Dengan jumlah pemilih sebanyak itu maka ada daya tarik bagi calon penghulu untuk memperoleh suara dari dusun sungai tunggak sebanyak-banyak untuk memperoleh kemenangan bagi calon penghulu.

Dalam pemilihan penghulu yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan penghulu panitia penyelektora telah membagikan surat undangan kepada masyarakat kepenghuluan teluk piyai khususnya di wilayah dusun sungai tunggak yang telah dibagikan oleh panitia agar datang pada hari H yang telah ditentukan panitia untuk memilih calon penghulu yang sesuai dengan pilihan mereka, agar menggunakan hak suaranya dalam pemilihan penghulu tersebut. Akan tetapi setelah penghitungan surat suara yang sah dan yang tidak sah banyak masyarakat yang tidak hadir pada saat pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai yang diselenggarakan secara serentak di Kecamatan Kubu tahun 2016. Berdasarkan data dari BPK Kepenghuluan Teluk Piyai tahun 2016 menunjukkan bahwa perolehan kertas suara yang tidak memilih di Dusun IV Sungai Tunggak sebanyak 247 atau sebesar 9,89% masyarakat yang tidak memilih.

## **6.3. Faktor-Faktor Perilaku Tidak Memilih Pada Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai Tahun 2016**

### **6.3.1 Faktor Sosial Ekonomi**

Menempatkan variabel status sosial ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku tidak memilih (golput) selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku golput tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih golput itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga (Efriza, 2012). Lazimnya, variabel status sosial ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya

juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku golput.

### 1. Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat dikatakan sangat mempengaruhi pemilihan Penghulu terhadap masyarakat yang memilih pada pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai pada Tahun 2016 secara serentak dilakukan di Kecamatan Kubu. Untuk melihat pengaruh pendidikan terhadap pemilihan yaitu dapat kita lihat dari tabel II.6 berdasarkan data pendidikan terakhir masyarakat teluk piyai yaitu pendidikan SD/Sederajat dengan jumlah persentase 18,7%, SMP/Sederajat dengan jumlah persentase 23,81%, SMA/Sederajat dengan jumlah persentase 38,47% dan selanjutnya untuk tamatan pendidikan Diploma (D1, D2, D3) dengan jumlah persentase 10,31%. Dan dilanjutkan dengan tamatan pendidikan untuk S1 dengan jumlah persentase 8.71%.

**Tabel II.6**  
**Data Pendidikan Terakhir Masyarakat**  
**Teluk Piyai**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SD/Sederajat	64	18,7%
2	SMP/Sederajat	82	23,81%
3	SMA/Sederajat	132	38,47%
4	Diploma(D1, D2, D3)	35	10,31%
5	Sarjana ( S1)	30	8,71%
	Jumlah	344	100%

Sumber: Profil Kantor Penghulu Peluk Piyai, 2017

Hal ini dapat kita lihat dengan jumlah persentase data pendidikan terakhir masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai yang sangat rendah untuk tamatan S1, mayoritas tamatan masyarakat Teluk Piyai hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA yang paling tinggi hal ini lah yang menyebabkanberpengaruh lebih besar terhadap perilaku tidak memilih masyarakat karena faktor pendidikan yang rendah yang dimiliki masyarakat maka sangat berpengaruh terhadap masyarakat untuk hadir dalam pemilihan calon penghulu untuk menggunakan hak suaranya.

Tingkat pendidikan dapat dikatakan sangat mempengaruhi masyarakat di kepenghuluan teluk piyai. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sebab pendidikan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menganalisa teori serta mampu untuk menentukan keputusan dalam persoalan-persoalan untuk mencapai tujuan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ketajaman dalam menganalisa informasi

tentang politik dan persoalan-persoalan sosial yang diterima semakin meningkat dan menciptakan minat dan kemampuannya dalam berpolitik. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka minat masyarakat untuk hadir dalam pemilihan penghulu sangatlah minim untuk datang ke TPS dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilihan penghulu yang dilaksanakan secara serentak di kecamatan kubu tahun 2016.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat teluk piyai yang berpendidikan Diploma dan Sarjana hanya sekitar 19,02%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Teluk Piyai yang berpendidikan Diploma dan Sarjana masih rendah.

### 2. Penghasilan

Penghasilan masyarakat sangat mempengaruhi pemilihan Penghulu terhadap masyarakat yang memilih pada pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai pada Tahun 2016 secara serentak dilakukan di Kecamatan Kubu. Untuk melihat pengaruh berdasarkan penghasilan terhadap pemilihan peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat yang ikut memilih pada pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai. Peneliti telah melakukan wawancara beberapa masyarakat yang tidak memilih dikarenakan alasan penghasilan sehari-hari dan membandingkan 100% masyarakat yang berpenghasilan tetap terhadap pemilihan penghulu dengan cara mewawancarai masyarakat yang tidak ikut memilih dan masyarakat yang ikut memilih pada pemilihan penghulu. Salah satunya bertujuan untuk melihat faktor sosial ekonomi terhadap penghasilan masyarakat yang memutuskan tidak memilih pada saat pemilihan penghulu serentak di Kepenghuluan Teluk Piyai Tahun 2016.

### 3. Pekerjaan

Pekerjaan masyarakat sangat mempengaruhi perilaku tidak memilih pada saat pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai.Karena pekerjaan sangat penting bagi masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-har karena ketidakhadiran dalam pemilihan penghulupara pemilih yang berkerja di lembaga-lembaga, sektor-sektor yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilihan penghulu dibandingkan para pemilih yang tidak berkerja di lembaga-lembaga atau sektor pemerintah yang tidak ada kaitannya langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti yang dijelaskan pada tabel II.9Mata Pencaharian Masyarakat Kepenghuluan Keluk Piyai yang beragam-ragam mulai dari Petani,

ABRI/POLRI, PNS, Pedagang, Wiraswasta, Buruh, Pertukangan, Honorer. Di Kepenghuluan Teluk Piyai sesuai dengan data yang di peroleh masyarakat teluk piyai yang lebih mendominasi adalah belum bekerja/pengangguran.

**Tabel II.9**  
**Mata Pencaharian Masyarakat**  
**Kepenghuluan Teluk Piyai**

No	Mata Pencaharian	Jml	Persentase
1	Petani	545	15,83%
2	ABRI/POLRI	30	0,87%
3	PNS	90	2,61%
4	Pedagang	125	3,63%
5	Wiraswasta	209	6,07%
6	Buruh	270	7,84%
7	Pertukangan	64	1,86%
8	Honorer	215	6,24%
9	Pelajar/Mahasiswa	452	13,12%
10	Belum Berkerja / Pengangguran	1.444	41,93%
Jumlah		3.444	100%

Sumber : Profil Kantor Penghulu Peluk Piyai, 2017

### 6.3.2 Faktor Psikologis

Penjelasan perilaku tidak memilih (golput) dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian penjelasan pertama melihat bahwa perilaku golput disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya.

Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran yang tidak acuh cenderung tidak memilih sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung betapa mungkin hal itu menyangkut tentang umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari pencatatan politik langsung karena tidak berhubungan kepentingannya. Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitik beratkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan bagi Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, melihat bahwa perilaku non voting disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomali, dan alienasi. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. faktor psikologis untuk mengetahui

penyebab perilaku tidak memilih (golput) dilihat dari:

#### a) Kepribadian Seseorang

Kepribadian seseorang ini melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, tak acuh, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Apabila dijelaskan lebih spesifik, kepribadian seseorang ini berkaitan dengan diri pribadi pemilih yang terlihat kurang bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran seperti tidak memilih karena sakit/lelah/malas, adanya keluarga yang sakit/wafat, keengganan ke TPS karena hujan dan letaknya jauh dari rumah, dan lain-lain.

#### c) Orientasi Kepribadian

Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak mempengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya.

### 1. Kepribadian Seorang Pemilih

Kepribadian seorang pemilih sangat mempengaruhi perilaku tidak memilih pada pemilihan penghulu dikepenghuluan teluk piyai untuk datang ke TPS dalam memberikan hak suaranya kepada calon penghulu. Karena kepribadian seseorang pemilih dapat dilihat dari sikap kepribadian yang saling toleran terhadap masyarakat baik dilingkungan masyarakat dan selalu aktif dalam kegiatan untuk kemajuan bersama, tidak pernah memaksa orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, selalu mengarahkan dirinya kehal-hal yang lebih bermanfaat bagi dirinya maupun untuk orang lain, percaya diri, mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya.

Keperibadian seorang pemilih sangat mempengaruhi perilaku pemilih disebabkan karena faktor pada dirinya sendiri yang menyebabkan dirinya tidak ikut memilih kepribadian yang tidak toleran kepada lingkungan masyarakat, disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Apalagi seorang tersebut sebagai pemimpin bagi keluarga juga akan berdampak kepada anak dan istrinya karena pengaruh dari seorang ayah terhadap anaknya dan kebiasaan buruk yang dilakukan orang tuanya akan berdampak kepada perilaku anak dan istrinya dalam hal tidak ikut memilih karena mereka merasa apa yang di katakana calon penghulu tentang visi dan misi tidak sejalan apa yang mereka inginkan. Sehingga

mereka memutuskan tidak ikut memilih dan memilih mencari pekerjaan dan melaksanakan aktifitas sehari-hari yang mereka lakukan.

## **2. Kedekatan Masyarakat Dengan Calon Penghulu**

Kedekatan masyarakat dengan salah satu calon penghulu dapat menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat ikut memilih maupun tidak ikut memilih, pada temuan hasil wawancara dilapangan mayoritas masyarakat yang menjadi informan tidak mempunyai hubungan dengan calon penghulu. Hal ini berarti bahwa kedekatan masyarakat dengan calon penghulu benar-benar mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Dari hasil temuan dilapangan menunjukkan mayoritas informan masyarakat menilai para calon penghulu sudah melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat namun masyarakat atau informan sudah paham bahwa itu adalah salah satu strategi mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan mendapat hati masyarakat melalui pendekatan tersebut.

## **3. Orientasi Kepribadian Pemilih**

Pada pemilihan penghulu tahun 2016 di Kepenghuluan Teluk Piyai masyarakat juga cenderung memilih golput dengan alasan faktor psikologis dimana kedekatan yang kurang mereka rasakan terhadap kandidat, hal ini disebabkan lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan kandidat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh ke lapisan bawah dan cenderung hanya berfokus di suatu tempat kemudian sikap apatis terhadap aktivitas politik seperti kampanye menyebabkan prasangka tentang aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia. Kemudian jika dilihat dari kepribadian masyarakat golput yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan sebagainya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih.

### **6.3.3 Faktor Pilihan Rasional**

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan

tentang pemilihan dan kandidat yang terpilih. Pada kenyataannya ada sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari satu pemilihan ke pemilihan lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam pemilu.

## **1. Tidak Memilih Calon Karena Tidak Ada Keuntungan**

Beberapa masyarakat beranggapan bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan apabila datang ikut di pemilihan penghulu teluk piyai. Hal ini tidak semua pemikiran masyarakat kepenghuluan teluk piyai berpikiran sama dengan beberapa masyarakat yang tidak ikut memilih karena tidak ada iming-iming yang diberikan oleh calon penghulu kepada masyarakat baik berupa uang tunai yang diberikan, maupun berupa bantuan yang berupa sembako yang telah diberikan kepada masyarakat yang ikut memilih, mereka memilih bukan karena ada keuntungan materi yang mereka dapatkan melainkan adanya perubahan yang bisa dilakukan oleh pemimpin terpilih nantinya untuk kemajuan Kepenghuluan Teluk Piyai di masa kepemimpinan 6 tahun mendatang.

## **2. Visi dan Misi Calon Penghulu**

Visi dan Misi calon penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai tahun 2016, yaitu:

- a. Syamsir, Visi mewujudkan Kepenghuluan Teluk Piyai yang maju dan sejahtera. Misi : a) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan Sumber Daya Alam, b) Meningkatkan persatuan kerukunan melalui program gotong-royong demi terwujudnya pembangunan, c) Mewujudkan masyarakat yang berbudaya yang berlandaskan Iman dan Taqwa, dan d) Memberikan pelayanan yang baik, bersih dan beribawa.
- b. Darma Endra Basyar, Misi a) Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah, b) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab, c) Memberdayakan lembaga desa yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga, d) Meningkatkan mutu perekonomian masyarakat, e) Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas.

- c. Makmur Hasan, Visi: mari bersama membangun Teluk Piyai yang makmur dan sejahtera serta berpendidikan. Misi: a) Terciptanya masyarakat yang berilmu pengetahuan dibidang: pertanian, perkebunan, perternakan, nelayan, dan b) Menyelenggarakan urusan pemerintah Kepenghuluan secara benar, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, c) Melaksanakan pembangunan kepenghuluan yang adil dan merata, dan d) Meningkatkan peran organisasi keagamaan dalam pemberdayaan umat.
- d. Eko Saputra, Visi: Teluk Piyai sebagai Kepenghuluan yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas lebih sejahtera dan berakhlak mulia. Misi: a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti : jalan, jembatan, serta infrastruktur strategis lainnya, b) Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat berkerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

Sumari, Visi: membangun Teluk Piyai secara adil dan merata berdasarkan skala prioritas. Misi: a) Mengambil keputusan dengan mengedepankan musyawarah, b) Meningkatkan pelayanan masyarakat, dan c) Membuat UKM di masyarakat.

#### 6.3.4 Faktor Kepercayaan Politik

Kepercayaan politik juga berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap kinerja dan *performance* pemerintah. Apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pemerintahan dalam suatu sistem politik. Dalam konteks perilaku *non-voting*, kepercayaan pada sistem politik yang dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih.

Tingkat kepercayaan masyarakat di Kepenghuluan Teluk Piyai terhadap pelaksanaan pemilihan penghulu cukup minim, karena masyarakat tidak percaya lagi dengan janji-janji calon penghulu yang hanya memberikan janji-janji palsu selama masa sosialisasi untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada saat pemilihan. Padahal setelah pemilihan berlangsung dan kekuasaan

sudah dimiliki, kebijakan yang dihasilkan jauh dari kata memuaskan.

#### 1. Tidak Percaya Dengan Kinerja Pemerintah Kepenghuluan

Ketidapercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan penghulusangat mempengaruhi pemilihan Penghulu terhadap masyarakat yang memilih pada pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai pada Tahun 2016 secara serentak dilakukan di Kecamatan Kubu. Untuk melihat pengaruh berdasarkan ketidakpercaayan terhadap pemilihan peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat yang tidak ikut memilih pada pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai. Peneliti telah melakukan wawancara beberapa masyarakat yang tidak memilih dikarenakan alasan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah kepenghuluan teluk piyai. Sehingga mereka memilih tidak ikut dalam pemilihan dikarenakan kecewa terhadap kinerja pemerintah penghulu, pelayanan yang kurang baik yang mereka rasakan selama ini, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin tidak merata didapatkan oleh masyarakat teluk piyai. Selain itu masih ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah masyarakat tidak mendapatkan haknya dikarenakan masih adanya sistem tebang pilih dalam pembagian bantuan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya sampai ketangan yang berhak mendapatkan tetapi mereka tidak mendapatkan hak mereka.

#### 2. Tidak Percaya Dengan Calon Penghulu

Dari data yang didapat diketahui bahwa sebagian informan tidak ikut memilih karena alasan masyarakat tidak percaya dengan calon penghulu. Sedangkan sebagian lagi tidak ikut memilih karena mereka lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka dari pada datang ke tempat pemilihan untuk memilih, mereka tidak percaya lagi dengan calon penghulu.

### 7. PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tidak memilih masyarakat yaitu : faktor sosial ekonomi, faktor psikologis, faktor pilihan rasional, faktor kepercayaan politik. Yang menyebabkan tingginya jumlah masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai yang tidak menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan penghulu yang dilaksanakan secara serentak di Kepenghuluan Teluk Piyai di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

1. Melihat faktor sosial ekonomi di Kepenghuluan Teluk Piyai bahwa

tingkat pendidikan yang tinggi menyebabkan perilaku seseorang tidak memilih, namun hanya ditemukan pada beberapa informan dan mayoritas golput disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah. Dengan berbagai persepsi menjadikan masyarakat teluk piyai lebih mementingkan urusan lain seperti bekerja untuk menambah penghasilan, daripada menghadiri pemilihan penghulu.

2. Melihat faktor psikologis masyarakat di Kepenghuluan Teluk Piyai masyarakat cenderung tidak memilih, dimana kurangnya kedekatan emosional pada diri calon penghulu, dan tingginya sikap apatis terhadap aktivitas politik yang menyebabkan prasangka tentang pemilihan penghulu sebagai sesuatu yang sia-sia.
3. Melihat faktor pilihan rasional masyarakat yang tidak ikut memilih karena mereka menganggap pergi memilih tidak memberikan manfaat dan keuntungan dan visi dan misi calon penghulu yang tak sejalan. Sehingga mereka lebih mementingkan urusan pekerjaan daripada datang ke tempat TPS.
4. Melihat faktor kepercayaan politik masyarakat yang tidak ikut memilih karena tidak percaya dengan kinerja pemerintah kepenghuluan teluk piyai dan sebagian masyarakat tidak percaya dengan calon penghulu. Hal ini sangat rasional, sehingga masyarakat lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka daripada menghadiri pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyai tahun 2016.

## 7.2 Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi proses pemilihan penghulu serentak di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dimasa akan datang. Adapun saran-saran dari penulis yang dapat diberikan sebagai berikut:

Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dimasyarakat untuk pemilihan penghulu yang akan mendatang bagi calon penghulu yang terpilih tingkatkanlah sumber daya pendidikan masyarakat yang ada di Kepenghuluan Teluk Piyai..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Almold K. Sheman dan Aliza Kolker. 1997. *The Sosial Bases of Politics*, California : A Division of Wodswarthin.
- Asfar, Muhammad, 1993, *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih*. *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 16, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Arief Subiyantoro, 2007, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Efriza, 2012, *Political explore*, Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2012, *Political Explore* ( Sebuah Kajian Ilmu Politik), Alfabeta, Bandung.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lexy J Moloeng, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Wirasarana Indonesia, Jakarta.
- Raymond F & Ros Sunstone J steven, 2012, *Perilaku Tidak Memilih Dalam Negara Demokrasi*, Pustaka Utama, Jakarta.

### Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perangkat Kepenghuluan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu.

**Skripsi :**

Tarmizi.2016.*Pemerintahan Desa ( studi kasus Pelayanan Publik Di Kepenghuluan Teluk Bano 1 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)*.Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.